



Judul : Demokrat siap legal usul hak interpelasi
Tanggal : Selasa, 20 Nopember 2012
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : A7

Demokrat Siap Legal Usul Hak Interpelasi

JAKARTA — Fraksi Partai Demokrat siap membendung rencana sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengulirkan interpelasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal kasus korupsi Hambalang. “Kalau perlu, akan dibahas di Sekretariat Gabungan,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat, Saan Mustopa di kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Saan berujar, jika wacana interpelasi terus bergulir, Demokrat akan membendungnya melalui lobi politik. Lobi akan diintensifkan pada lima fraksi pendukung pemerintahan, yakni Fraksi Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat ini menyatakan wacana interpelasi atas kasus Hambalang berlebihan. Alasannya, pengusutan kasus Hambalang sudah masuk ke ranah hukum. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang tersangka, yaitu pejabat pembuat komitmen proyek, Dedy Kusdinar.

Wacana interpelasi Hambalang bergulir setelah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan beberapa kementerian dalam penetapan anggaran proyek Hambalang menjadi tahun jamak. Badan Akuntabilitas mengusulkan agar Dewan menggunakan hak interpelasi. Saan tak sependapat dengan rekomendasi Badan Akuntabilitas. Menurut dia, penuntasan kasus Hambalang tak perlu masuk ke ranah politik.

Senada dengan Saan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menilai penyelesaian kasus Hambalang sebaiknya dilakukan melalui proses hukum. Karena itu, Priyo mengisyaratkan tak setuju dengan hak interpelasi. “Biarkan badan hukum untuk menyelesaikan dengan cepat.”

Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan tak akan melarang anggotanya mengajukan hak interpelasi. ● IRA GUSLINA SUFA | WAYAN AGUS PURNOMO